

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mamudji, Sri, dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

JURNAL

Al Zahsy, V. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 68–79.

Amir, R.S., Ahmad K., dan Baharuddin H. "Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum dan Membela Diri pada Kasus Penghinaan di Media Sosial." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 1501–1515.

Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, dan Regina Margarettha. "Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup." *Jurnal Legislatif* 5, no. 1 (2021): 1–15.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/18551>.

Ecti, A.L.M., Sopyonyono E., dan Rozah U. "Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 1–20.

Harahap, Irawan, dan Riantika Pratiwi. "Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia." *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (2023): 83–89.
<http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/96>.

Hawasara. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587–594. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

Indrawati, Nina. "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti-SLAPP) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia." *Media Iuris* 5, no. 1 (2022): 115–134. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.

Kalalo, Gideon Bonatang, Johny Sondakh, dan Hasim M. Muaja. "Peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Alasan Penghapus Pidana/Penuntutan dalam Hukum Lingkungan Hidup." *Lex Crimen* 12, no. 4 (2024): 1–15.

Lagho, Yohana Oktavia Ngode, Karolus K. Medan, dan Orpa G. Manuain. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Van Rechtsverloping) Pada Tindak Pidana Korupsi." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 129–144.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.391>.

- Marwandianto, M., dan Nasution H.A. "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1–25.
- Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016).
- Nelson, Febby Mutiara. "Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 6 (2022).
- Nurhafifah, dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (2015): 341–362.
- Nurlaili, Siti Amira, dan Winona Buana Prayoga. "Dinamika Kebebasan Berpendapat: Kasus Penahanan Aktivis Lingkungan Karimunjawa dalam Konteks Kritik terhadap Tambak Ilegal." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 23 (2024): 640–652.
- Nur Arif. "Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 2073/Pid.Sus/2023/PN.Sby." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024).
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/906/953>.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. "Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 4 (2022).
- Rachmawaty, Rani, M. Muamar Gunawan, dan Nia Nurviani. "Judicial Perspectives on the Equitable Resolution of Anti-SLAPP Cases: Insights from Indonesia." *Journal of Law, Environmental and Justice* 2, no. 1 (2024): 18–41.
<https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.88>.
- Runturambi, Fransisco Jero. "Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim." *Lex Crimen* 4, no. 4 (2015).
- Sariroh, Siti, dan Muh. Ali. "The Implementation of Article 66 Environmental Protection and Management Law of Strategic Legal Action Against Public Participation Due to Criminal Acts of Environmental Destruction at State Court." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 20, no. 2 (2024): 173–189.
- Shilby, S. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1737–1758.

Zulhakim, Mohammad M., dan Marlina. "Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 12 (2023): 976–985.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Diucapkan 29 April 2025.

Pengadilan Tinggi Semarang. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG. Diucapkan 21 Mei 2024.

INTERNET

"Menelaah Putusan Aktivis Lingkungan Daniel Frits." *MariNews Mahkamah Agung RI*, Februari 2025. Diakses 11 Maret 2026.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/menelaah-putusan-aktivis-lingkungan-daniel-frits-0bs>.

"Menilik Batasan Hukum bagi Pejuang Lingkungan." *MariNews Mahkamah Agung RI*, November 2025. Diakses 13 Maret 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menilik-batasan-hukum-bagi-pejuang-lingkungan-yang-09o>.

"Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dalam Kacamata PERMA Nomor 1 Tahun 2023." *Pengadilan Negeri Purwakarta*. Diakses 14 Maret 2026. <https://pn-purwakarta.go.id/penanganan-perkara-lingkungan-hidup-dalam-kacamata-perma-nomor-1-tahun-2023-tentang-pedoman-mengadili-perkara-lingkungan-hidup.html>.

"Tonggak Sejarah: Putusan Pidana Anti-SLAPP Pertama di RI." *MariNews Mahkamah Agung RI*, 9 Februari 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tonggak-sejarah-putusan-pidana-anti-slapp-pertama-di-ri-0oi>.